

PENGANTAR REDAKSI

Persoalan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah, baik di pedesaan maupun perkotaan sampai sekarang masih menjadi isu yang banyak diperbincangkan di negara kita. Keberhasilan pembangunan ekonomi, tampaknya tidak disertai dengan keberhasilan dalam mengatasi kesenjangan ekonomi antarwilayah maupun antarsektor. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya seperti yang tercantum dalam GBHN tampaknya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ketimpangan pembangunan dan ketidaknerataan hasil pembangunan telah menciptakan ketimpangan sosial ekonomi.

Para penulis dalam *Populasi* nomor ini mendiskusikan persoalan ini lebih lanjut. Sukamdi dalam tulisannya menyatakan bahwa kemiskinan harus dilihat sebagai suatu agenda pembangunan yang tidak pernah habis, sehingga penanggulangan terhadap masalah itu harus dilakukan secara terus menerus. Masalah ketidaknerataan pembangunan juga dibahas oleh Chris Manning dalam analisisnya tentang perubahan sosial yang berkembang berkaitan dengan perubahan tingkat upah yang terjadi di Jawa. Perubahan struktur ekonomi dan rendahnya tingkat upah di pedesaan disiasati oleh penduduk pedesaan dengan melakukan migrasi ke daerah perkotaan. Tingkat upah di perkotaan ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat upah di pedesaan. Walaupun demikian, apabila dilihat secara keseluruhan, tingkat upah

tersebut ternyata relatif rendah dibandingkan dengan peningkatan harga barang kebutuhan. Perbedaan tingkat upah juga ditemukan oleh Abbas Effendi berdasarkan hasil penelitiannya di dua kota di Sumatera.

Ketimpangan pembangunan ekonomi tidak semata-mata menciptakan perpindahan penduduk antarwilayah di dalam negeri, tetapi juga mendorong berkembangnya migrasi internasional. Dalam kaitan itu, Marcelinus Molo menyatakan bahwa Indonesia sudah tertinggal jauh dibandingkan dengan beberapa negara lain. Pengiriman tenaga kerja Indonesia dengan *skill* yang rendah di masa depan akan banyak menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera menyesuaikan diri dengan suatu tatanan migrasi internasional yang menunjuk pada norma-norma, hukum-hukum, dan kelembagaan yang dikembangkan negara guna menangani isu yang muncul dalam migrasi internasional.

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat umum. Hal ini telah menjadi perhatian Tukiran dan Pande Made Kutanegara dalam penelitian di Kendari dan penelitian M. Yusril yang melihat kinerja puskesmas di Bengkulu. Kasus-kasus ini pun dapat memberikan gambaran bahwa kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi gejala penting walaupun berbagai upaya pembangunan telah dan terus dilakukan.

*Pande Made Kutanegara*